



MADRASA:

Journal of Islamic Educational Management

ISSN: (Print); ISSN: (Online)

Journal homepage: <http://madrasa.id/index.php/madrasa>

2019, VOL.2, NO.1, 033-041

<https://doi.org/10.32940/mjiem.v2i1.44>



 Open access

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN MADRASAH ALIYAH KEJURUAN

Nita Andriani Safitri^a, Rina Marlina^b

^aandrianita06@gmail.com: Program Magister Manajemen Pendidikan Islam; Jalan Soekarno-Hatta-Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat 40292.

^bmarlinarina80@yahoo.com: Sekolah Menengah Pertama Sekar Pertiwi Blok Z No.5 Komplek Taman Cileunyi. Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40624.

ABSTRAK

This paper aims to uncover the implementation of the policy of vocational madrasah aliyah (MAK) in Indonesia. The research method used in the study was qualitative. Data was collected through interviews, observations and documentation studies. The results showed that the existence of MAK was considered legal. This was marked by the issuance of the Minister of Religion Affair (PMA) Republic of Indonesia No. 60 of 2015. In its implementation, the establishment of MAK focused on MAK as public school which is outside of Java Island such as North Sulawesi and Riau. The implementation of the pilot project was implemented in 2019, because until 2018 the building of MAKN as national pilot project was just completed. Some foundations or private parties tried to set up MAK but failed due to lack of funds. So they lacked interest. Therefore, the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia, through the Madrasah Director needs to product regulations that the community or foundation does not rush to establish MAK. There are needs to be strategic planning to establish MAK.

Keyword: Policy, Vocational Madrasah Aliyah, Islamic Education

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan mengungkap pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan madrasah aliyah kejuruan (MAK) di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan MAK secara hukum telah dianggap legal. Hal ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 60 Tahun 2015. Dalam pelaksanaannya pendirian MAK difokuskan kepada MAK Negeri yang berada di luar Pulau Jawa seperti Sulawesi Utara dan Riau. Penyelenggaraan MAKN percontohan baru terlaksana pada tahun 2019 ini, karena sampai dengan tahun 2018 gedung MAKN percontohan nasional ini baru selesai dibangun. Beberapa Yayasan atau pihak swasta mencoba mendirikan MAK namun gagal karena kekurangan biaya sehingga kekurangan peminat. Oleh karena itu Kementerian Agama Republik Indonesia, melalui Direktur Madrasah perlu mengeluarkan regulasi agar masyarakat atau yayasannya tidak tergesa-gesa mendirikan MAK. Perlu ada perencanaan strategis untuk mendirikan MAK.

Kata Kunci: Kebijakan, Madrasah Aliyah Kejuruan, Pendidikan Islam.

RIWAYAT NASKAH,

Dikirim 12 April 2019

Diterima 20 April 2019

PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan madrasah telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga (3) Menteri Tahun 1975. Berdasarkan SKB tersebut, madrasah secara formal sudah dianggap setara dengan sekolah umum yang dikelola oleh Departemen Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia. Meskipun demikian madrasah tetap mempertahankan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu madrasah disebut dengan sekolah umum berciri khas keagamaan Islam. Kurikulum madrasah tetap menempatkan mata pelajaran Agama Islam sebagai mata pokok atau dasar (minimal 30% memuat mata Pelajaran Agama Islam), sementara mata pelajaran umum merupakan mata pelajaran tambahan (Nurhayati, 2013, p. 137; Indonesia, 2017).

Beberapa tahun setelah terbitnya SKB 3 menteri, madrasah semakin berkembang. Madrasah yang sebelumnya hanya fokus pada penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) kini bertambah dengan Raudatul Atfal (RA). Setelah itu dibentuk Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) dan/atau Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK). Kebijakan tersebut dilaksanakan sejak tahun 1987 hingga tahun 2007. Sejak tahun 2008, nama Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) diubah menjadi Program Studi Agama (PSA). Tahun 2013, kebijakan tentang penyelenggaraan madrasah lebih dikembangkan lagi. Melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) No 90 tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama No 60 Tahun 2015, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Direktur Madrasah berwenang menyelenggarakan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Sejak itulah penggunaan singkatan MAK tidak lagi mengacu kepada Madrasah Aliyah Keagamaan tetapi kepada Madrasah Aliyah Kejuruan. Selain itu nama Program Studi Agama (PSA) dihilangkan (Yasin, 2017, p. 6; Indonesia, 2017).

Kebijakan pemerintah dalam mengembangkan penyelenggaraan madrasah, terutama MAK agar setara dengan sekolah umum, terutama dengan Sekolah Menengah Kejuruan SMK, memiliki tantangannya sendiri. Beban kurikulum di MAK menjadi bertambah berat. Selain dibebani dengan kewajiban 30% mata pelajaran di MAK harus memuat mata pelajaran keagamaan Islam (Sejarah kebudayaan Islam, Bahasa Arab, Akidah-Akhlak, Qur'an – Hadits, dan Fiqih) sekaligus memberikan mata pelajaran kejuruan atau keterampilan kerja atau vokasional. Banyaknya mata pelajaran kejuruan bergantung pada jenis keahlian yang diberikan di MAK. Bidang keahlian agribisnis tanaman misalnya, setidaknya harus memberikan enam mata pelajaran, yaitu Agribisnis Tanaman dan Hortikultura, Agribisnis Tanaman Perkebunan, Permuliaan dan Perbenihan Tanaman, Lanskap dan Pertamanan, Produksi dan Pengelolaan Perkebunan, dan Agribisnis Organik Ekologi (youthmanual, 2019).

Menyelenggarakan MAK juga membutuhkan biaya yang cukup besar. MAK Al-Azhar Baiturrahman Cimaung Bandung hingga kini belum bisa menerima siswa baru karena terkendala biaya operasional yang besar. Citra madrasah di masyarakat terlanjur identik dengan “sekolah agama” bukan sekolah umum apalagi sekolah kejuruan atau keterampilan. Sehingga masyarakat lebih percaya kepada SMK daripada MAK dalam hal menyekolahkan anaknya agar cepat bekerja. Hal ini dialami oleh MAK Teknik Informatika Darul Ulum Bandung. Masyarakat sekitar madrasah mempertanyakan, “masa sih madrasah bisa meluluskan siswanya pandai bekerja? Kalau pandai berkhotbah iya!”

Artikel ini bertujuan mengungkap bagaimana agar kebijakan penyelenggaraan MAK berjalan efektif dan efisien serta mengeksplorasi cara sebagian MAK yang berhasil menyelenggarakan pembelajarannya. Teori yang digunakan untuk mendiskusikan persoalan ini adalah teori *successful school's improvement strategy* dari Martin Thrupp dan Robert Willmott (Thrupp, Martin; Willmott, Robert, 2003).

METODE PENELITIAN

Pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yaitu dengan menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumen. Observasi dan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data lapangan sedangkan studi dokumentasi digunakan untuk menganalisis kebijakan. Studi lapangan difokuskan di MAK Teknik Informatika (TI) Darul Ulum, Pondok Pesantren An-Nidzomiyah Hegarmanah-Cikancung Bandung; Madrasah Aliyah Kejuruan Akuntansi Cibinong Bogor dan MAK Al-Azhar Baiturrahman Cimaung Bandung. Studi kebijakan di fokuskan pada PMA No. 60 Tahun 2015. Gabungan antara data lapangan dengan analisis kebijakan dapat menjadi bahan penarikan kesimpulan tentang manajemen MAK (Irawan, *Strategic Management System as The Internationalization Policy of Indonesian Islamic Higher Education*, 2017, p. 151).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Temuan

MAK TI Darul Ulum membuka bidang teknik komputer jaringan, multimedia, rekayasa perangkat lunak dan penyiaran. MAK TI Darul Ulum berada di Pondok Pesantren An-Nidzomiyah Hegarmanah-Cikancung Bandung. Mereka mengklaim bahwa MAK TI Darul Ulum Bandung memiliki kesamaan dengan SMK pada umumnya yaitu; 1) memiliki kurikulum yang fleksibel sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan pasar; 2) meningkatkan percaya diri siswa ketika lulus karena sudah terbiasa bekerja, baik melalui praktik di madrasah maupun praktik kerja industri (Prakerin); 3) tamatannya diminati perusahaan karena sudah memiliki keterampilan yang memadai; 4) memberikan pengalaman kerja sehingga lulusan siap untuk membuka lapangan usaha baru; 5) membekali murid dengan cukup teori sehingga ketika lulus tetap bisa mengembangkan ilmu ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mereka juga mengklaim bahwa lulusan MAK TI Darul Ulum Bandung akan memperoleh sejumlah keuntungan diantaranya; 1) memperoleh dua ijazah yaitu ijazah setara SMK dan ijazah D1 standar kerja; 2) difasilitasi dengan komputer aplikasi dunia kerja; 3) dilatih manajemen pemasaran; 4) dilatih kewirausahaan; dilatih membuat website; 5) dilatih merakit komputer; 6) dilatih menggunakan komputer animasi (membuat film kartun); 7) dilatih membuat *video compact disc* (VCD) dan *Digital Versatile Disc* atau *Digital Video Disc* (DVD) film dan lagu; 8) dilatih membuat design grafis; 9) dilatih teknik grafika (percetakan dan sablon); 10) difasilitasi internet sekolah (makdarulum, 2019).

MAK Akuntansi Cibinong Bogor terletak di Pondok Pesantren al-Huda Jalan al-Huda Pabuaran Cibinong Bogor. Pondok Pesantren Al Huda memiliki nomor statistic pondok pesantren (NSPP) 510032010009. Aset Pondok Pesantren Al Huda diantaranya adalah Wartel/Warnet/Rental Komputer. Jumlah santri di Pesantren Al Huda adalah 342, dengan rincian jumlah santri pria berjumlah 191 orang dan santri perempuan berjumlah 151 orang, dengan tenaga pengajar berjumlah 5 orang. Pondok Pesantren ini didirikan oleh Kyai Haji (KH) Tubagus Sayed AL Bustomi (pbsb.ditpdpontren.kemenag.go.id, 2016).

MAK Akuntansi Cibinong berada di bawah naungan Yayasan al-Huda Cibinong. Yayasan tersebut berdiri tahun 1982. Ada beberapa sekolah dan madrasah yang didirikan oleh yayasan diantaranya Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan MTs Al Huda, SMA Citra Madani, SMK Manunggal, SMK Kesehatan Citra Husada SMK Tridaya dan MAK Akuntansi Cibinong Bogor. MAK Akuntansi merupakan lembaga pendidikan yang paling jarang dipublikasikan oleh Yayasan Al-Huda Pabuaran

Cibinong. Dalam *foursquare city guide* tentang al-Huda Cibinong, orang yang mengaku Miss Baby menguraikan sejumlah madrasah dan sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Al-Huda tanpa menyebutkan MAK Akuntansi Cibinong (foursquare.com/v/yayasan-al-huda-cibinong, 2018).



Baligho Pendaftaran Siswa Baru MAK Akuntansi Cibinong Bogor

MAK Al-Azhar Baiturrahman Cimaung Bandung berada di dalam kompleks Pondok Pesantren Baiturrahman Cimaung. Pondok Pesantren ini didirikan tahun 2012 oleh K.H Yayat Sudrajat, M.Pd. Nomor statistik pondok pesantren ini adalah 510032040635. Pondok Pesantren Baiturrahman Cimaung Bandung beralamat di Kampung Ciawigede RT.02 RW.08 Desa Pasirhuni Kec. Cimaung, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat. Dalam bidang ekonomi, Pondok Pesantren Baiturrahman Cimaung tidak memiliki potensi apa pun. Jumlah santri di Pesantren ini pun hanya 50 orang. Santri pria berjumlah 30 orang dan santri perempuan berjumlah 20 orang. Tenaga pengajar berjumlah 14 orang (pdppkemenag, 2016).

MAK Al-Azhar tidak terwujud karena minat peserta didik yang mendaftar MAK kurang dari kuota yang ditetapkan. Sementara itu biaya operasional untuk penyelenggaraan MAK cukup besar, terutama untuk praktik lapangan. Jadi penyelenggaraan MAK tersebut masih berupa rencana dan secara praktis kemungkinan besar tidak akan terlaksana (ABC, 2019)

Pembahasan

Dalam rangka merespons kebutuhan tenaga kerja teknis baik di perusahaan maupun di lembaga pemerintahan, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jendral Pendidikan Islam, mulai tahun 2012 telah mewacanakan kebijakan membuka madrasah aliyah kejuruan. Tindak lanjut dari upaya tersebut, tahun 2015 diterbitkanlah PMA No. 60 Tahun 2015. Dalam Pasal 1 ayat 1 PMA tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud penyelenggaraan pendidikan madrasah adalah Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Dalam Pasal 1 ayat 7 PMA tersebut ditegaskan bahwa MAK adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara SMP atau MTs (PMA, 2015).

Direktur Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia saat itu, Nur Kholis Setiawan, menindaklanjuti PMA No. 60 Tahun 2015 dengan menerbitkan

Surat atas nama Direktur Madrasah Nomor Dj.I/Dt.I.I/4/HK.00/415B/2015 tentang penyampaian salinan PMA Nomor 60 tahun 2015, perubahan atas PMA Nomor 90 Tahun 2013, dan penyelenggaraan pendidikan madrasah. Surat tersebut juga berisi himbauan agar menyosialisasikan dan menindaklanjuti penyelenggaraan pendidikan madrasah (Direktur Madrasah, 2015). Tahun 2017, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktur Madrasah membangun proyek percontohan nasional MAK-Negeri di dua lokasi, yaitu; Ende (Nusa Tenggara Timur) dan Bolaang Mongondow (Sulawesi Utara). Di Bolaang Mongondow, lokasi MAKN berada di Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak Kabupaten Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. Pada tahun tersebut telah dibangun gedung MAKN dan siap dibuka tahun 2017. Akan tetapi MAK Negeri tersebut justru baru akan menerima pendaftaran siswa baru pada tahun pelajaran 2019/2020 (Sulut, 2019). Sementara itu, tidak ada data tentang MAK Negeri di Ende. Situs Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Timur yakni <https://ntt.kemenag.go.id/> tidak memberitakan apa pun tentang proyek percontohan MAK Negeri tersebut. Proyek percontohan MAK Negeri Kementerian Agama Republik Indonesia justru direspons oleh Kabupaten Rohul Provinsi Riau. Tahun 2018 diperkirakan MAKN percontohan tersebut sudah selesai dibangun dan siap menerima siswa baru. Menurut Ahmad Supardi, Kepala Kantor Kementerian Agama Rohul, sebagai tahap awal, MAKN tersebut akan menerima sebanyak 100 siswa baru. MAKN Riau Rohul akan menerapkan sistem *boarding school* atau asrama, sama halnya dengan pondok pesantren dan fokus melahirkan ustad-ustad yang ahli di bidang pertanian dan perkebunan (Riau, 2015).

Kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam membangun madrasah aliyah kejuruan fokus untuk daerah-daerah yang berada di luar Pulau Jawa seperti Provinsi Sulawesi Utara dan Riau. Hal dilakukan agar terjadi pemerataan pembangunan terutama untuk daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Proyek percontohan MAK juga fokus pada MAK Negeri yang memiliki potensi pengembangan kejuruan tertentu seperti perkebunan dan kelautan. Oleh karena itu wajar jika beberapa pendirian MAK di Pulau Jawa tidak mendapat respons positif dari pemangku kebijakan, apalagi ketika MAK yang akan dibangun tersebut statusnya swasta. Tuntutan percepatan dan pemerataan pembangunan sumber daya manusia di luar Pulau menjadi prioritas tujuan pendidikan nasional. Thrupp mengatakan bahwa proyek percontohan pendidikan yang efektif mesti mempertimbangkan tujuan pendidikan secara lebih luas, *“government policy and ensuing statutory requirements are part of the larger context within which the school operates and moves forward. Exploiting and managing these, including those which might be viewed as irritants, is part of the successful school’s improvement strategy”* (Thrupp, Martin; Willmott, Robert, 2003, p. 95). Poster juga mengatakan hal sama yakni *“the central definition of school improvement that was to be elaborated for the project was that of ‘a systematic, sustained effort aimed at change in learning conditions and other related internal conditions in one or more schools, with the aim of accomplishing educational goals more effectively’* (Poster, 1999, p. 18).

Penyelenggaraan MAK di Al-Azhar Cimaung tidak dapat terlaksana karena tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Pertama madrasah tersebut bukan negeri, berada di Pulau Jawa dan tidak menunjukkan potensi kejuruan yang akan dikembangkan yang relevan dengan potensi daerahnya. Oleh karena itu alasan kurangnya dana operasional menjadi hal yang wajar. Jika dipaksakan maka kualitas MAK yang akan diselenggarakan tidak akan baik. Dua MAK lain berhasil menerima siswa baru akan tetapi belum terjamin keberlanjutannya. Bahkan MAK TI Darul Ulum Cikancung Bandung yang mengklaim dirinya sebagai MAK bidang teknik komputer jaringan, multimedia, rekayasa perangkat lunak dan penyiaran, ternyata tidak memiliki website (situs atau laman) lembaga yang jelas. Hal yang sama terjadi pada MAK Akuntasi Cibinong berada di bawah naungan Yayasan al-Huda Cibinong,

tidak ada keterangan berapa jumlah peserta didik MAK. Pendirian madrasah yang hanya sebatas berdiri memang mudah akan tetapi kualitas madrasah yang didirikan tidak terjamin. Pendirian madrasah yang berkualitas tidak bisa dilaksanakan secara instan, *“there are no easy, ready-made panaceas which can be transposed into a school to provide instant and outstanding success in every area. Strategic intent is an approach which seems to have a lot to offer to those in schools, as an alternative to strategic planning. With strategic intent the school needs to establish a process of coping with and using the rapid change and turbulence. It does this not by detailed planning but by ‘binding’ the staff together in the furtherance of key priorities. If we have flexible budgets that adjust with the number of pupils, then staffing flexibility on the supply side is an organisational necessity. The challenge is to find ways to empower teachers to be responsible for their career and salary management.”* (Thrupp, Martin; Willmott, Robert, 2003, pp. 137-138).

Secara teori pendirian MAK akan memenuhi dua kebutuhan yakni menyiapkan calon ustaz dan tenaga kerja siap pakai. Secara teori MAK membekali peserta didik dengan ilmu-ilmu keagamaan Islam dan sekaligus dengan keterampilan kerja (Halim, 2008, p. 92). (U, 2013. h. 175), akan tetapi jika dikerjakan secara serampangan maka tujuan tersebut tidak akan tercapai dengan baik. Selain itu kurikulum madrasah aliyah kejuruan hendaknya disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing (Ibrahim, 2017, p. 1). Ketika potensi itu tidak jelas maka yang terjadi adalah sepi peminat, bahkan tidak akan ada peminat sama sekali, seperti yang terjadi pada MAK di Al-Azhar Cimaung Bandung.

PMA No. 60 Tahun 2015 tidak bermaksud menghimbau kepada seluruh pemangku kepentingan untuk berlomba-lomba mendirikan MAK. PMA tersebut lebih ingin menunjukkan bahwa MAK diakui secara legal oleh Kementerian Agama dan dianggap setara dengan Sekolah Menengah Kejuruan yang berada dalam Kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ada misi lain dari madrasah yang biasanya berada di bawah yayasan. Peserta didik yang menjadi sasaran madrasah aliyah kejuruan adalah mereka yang kemampuan ekonomi orang tuanya menengah ke bawah dan terancam tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Halim, 2008, p. 89). Misi pengabdian kepada masyarakat inilah biasanya yang mendorong yayasan bersikukuh mendirikan madrasah-madrasah baru. Misi ini bersinergi dengan misi keagamaan Islam yaitu membangun iman. Dalam kasus MAK ini selain membekali peserta didik dengan keterampilan siap pakai juga harus membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, mengalami perubahan tingkah laku, jasmani dan rohani dan bekal untuk hidup di dunia dan akhirat yakni membangun iman dan taqwa (Tafsir, 2014, p. 49). MAK, sebagai bagian dari lembaga pendidikan Islam juga memiliki misi menjadikan peserta didik sebagai muslimin dan muslimat yang paripurna yakni memiliki keterampilan, dapat menyelesaikan masalah secara ilmiah dan filosofis, memiliki dan mengembangkan sains, dan hatinya bertakwa kepada Allah swt. (Tafsir, 2014, p. 50). Misi keagamaan inilah yang menjadi dasar berdirinya beberapa yayasan keagamaan Islam yang bersinergi dengan pendidikan. Peserta didik yang menjadi siswa madrasah sering kali tidak sanggup membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) namun tetap diterima di madrasah terutama di madrasah swasta.

Menurut PMA No. 60 Tahun 2015, kurikulum MAK didasarkan pada sistem pendidikan nasional dan pendidikan keagamaan Islam secara terintegrasi. *Integrated curriculum* memadukan kurikulum pendidikan Islam dengan kurikulum 2013. Selain itu MAK juga harus memasukkan mata pelajaran keterampilan sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya. MAK bertujuan memadukan antara iman dan taqwa (imtaq) dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). MAK memasukkan iptek agar MAK sejajar dengan SMK. MAK pun mempertahankan keilmuan agama Islam agar tetap memiliki ciri sebagai lembaga pendidikan Islam (Irawan, Paradigma Keilmuan

Manajemen Pendidikan, 2016). Secara normatif penciptaan suasana keagamaan Islam di MAK sebaiknya dilakukan pula dalam bidang sarana dan prasarana, pergaulan dan berpakaian pakaian (U, 2013, p. 176). Sarana dan prasarana yang memadai dapat menunjang proses belajar mengajar, sehingga kualitas lembaga MAK setara dengan SMK pada umumnya karena pengelolaannya yang profesional dan akuntabel (Nurhidayati, 2009, p. 148).

SIMPULAN

Penyelenggaraan MAK yang dikelola oleh Kementerian Agama Republik Indonesia telah memiliki payung hukum yang jelas sejak diterbitkannya PMA No. 60 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan madrasah. Proyek percontohan nasional penyelenggaraan MAK difokus ke daerah luar Jawa seperti Sulawesi Utara dan Riau. Hal ini dilakukan agar pengembangan pendidikan Islam khususnya MAK sejalan dengan pembangunan nasional yang bertujuan melakukan pemerataan pembangunan terutama di Wilayah Indonesia Timur. Proyek percontohan nasional pendirian MAK di Indonesia dimulai antara tahun 2016 hingga 2018 dan fokus pada MAK Negeri. Hal ini ditandai dengan selesainya pembangunan gedung MAK yang didanai oleh Kementerian Agama dan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Beberapa pendirian MAK yang diprakarsai oleh swasta atau yayasan tidak terlaksana dengan baik karena kekurangan dukungan dana. Bagaimana pun pendirian MAK memerlukan anggaran yang lebih besar dibanding dengan mendirikan MA pada umumnya karena MAK memerlukan sejumlah alat praktikum dan laboratorium keterampilan yang sesuai dengan jenis keahlian yang diselenggarakan. Agar pendirian MAK terkendali dan kualitasnya terjaga, Direktur Madrasah perlu mengeluarkan kebijakan dan regulasi tentang syarat-syarat pendirian MAK terutama yang diprakarsai oleh swasta atau yayasan pendidikan Islam, agar pendirian MAK lebih selektif dan terencana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- ABC, W. T. (2019, Februari 14). mengapa tidak terwujud. *Wawancara dengan Tim Pengembang Mahad Aly Baiturrahman Cimaung*. (Nita, Interviewer) Bandung.
- Adha, B. A. (2016). *Kanwil Kemenag mulai bangun Madrasah Aliyah Kejuruan*. *Antarane.ws.com*.
- Agama, K. (n.d.).
- Direktur Madrasah, D. J. (2015, Desember 21). *Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah*. Jakarta.
- Emnis, A. H. (2014). Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia. *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam*, 3, 483-496.
- foursquare.com/v/yayasan-al-huda-cibinong. (2018, Januari 22). <https://foursquare.com/v/yayasan-al-huda-cibinong/4f1f49dbe4b035766aacodef>. Retrieved Juli 14, 2019, from <https://foursquare.com/v/yayasan-al-huda-cibinong/4f1f49dbe4b035766aacodef>: <https://foursquare.com/v/yayasan-al-huda-cibinong/4f1f49dbe4b035766aacodef>
- Halim, A. R. (2008). Aktualisasi Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Lentera Pendidikan*, 11(1), 83-100.
- Ibrahim, A. (2017). 2017, Kemenag Siapkan 6 Madrasah Kejuruan. *Nasional Pendidikan*, p. 1.
- Indonesia, D. J. (2017, 13 Juli). <http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id2=sejarahpendis>.

- Retrieved 2019, from <http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id2=sejarahpendis>
- Irawan. (2016). Paradigma Keilmuan Manajemen Pendidikan. *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 305.
- Irawan. (2017). Strategic Management System as The Internationalization Policy of Indonesian Islamic Higher Education. *1st Yogyakarta International Conference on Educational Management/Administration and Pedagogy (YICEMAP 2017)*. 66, pp. 150-156. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*.
- makdarululum. (2019, 7 13). <https://makdarululum.wordpress.com/home/>. Retrieved 2019, from <https://makdarululum.wordpress.com/home/>: <https://makdarululum.wordpress.com/home/>
- Mkd. (2017). *Tahun 2017, Kemenag Bangun Piloting 6 MAN Kejuruan*. Kementerian Agama Republik Indonesia. www.kemenag.go.id.
- Nurhayati, A. (2013). Fenomena Madrasah Pasca SKB 3 Menteri Tahun 1975 dan Implikasinya terhadap Dunia Pendidikan. *Ta'alum*, 1(2), 133-144.
- Nurhidayati, S. (2009). Kebijakan Pemerintah tentang Satuan Pendidikan Keagamaan: Tantangan Terhadap Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah. *Lentera Pendidikan*, 12(2), 138-151.
- pbsb.ditdpontren.kemenag.go.id. (2016). <http://pbsb.ditdpontren.kemenag.go.id/pdpp/profil/515>. Retrieved Juli 14, 2019, from <http://pbsb.ditdpontren.kemenag.go.id/pdpp/profil/515>: <http://pbsb.ditdpontren.kemenag.go.id>
- pdppkemenag. (2016). <http://pbsb.ditdpontren.kemenag.go.id/pdpp/profil/11675>. Retrieved 7 14, 2019, from <http://pbsb.ditdpontren.kemenag.go.id/pdpp/profil/11675>: pbsb.ditdpontren.kemenag.go.id
- PMA, R. N. (2015, November 13). Peraturan Menteri Agama No 60 Tahun 2015. Jakarta: Direktorat Jenderal Direktur Madrasah .
- Poster, C. (1999). *Restructuring: The Key to Effective School Management*. London: Routleg.
- Prastowo, A. (2014). Paradigma Baru Madrasah dalam Implemntasi Kebijakan Kurikulum 2013. *Jurnal Pendiidkan Islam*, 3(1), 95-113.
- Ref, D. (2017). *Kabid Pendis Tinjau Lokasi Pembangunan MAK*. Kementerian Agama Republik Indonesia. ntt.kemenag.go.id.
- Riau, U. (2015, Desember Kamis 10). <http://www.utusanriau.co>. Retrieved 7 Minggu tanggal 14, 2019, from <http://www.utusanriau.co>: <http://www.utusanriau.co>
- S, S. U. (2011). Arah Pendidikan di Indonesia dalam Tataran Kebijakan dan Implementasi. *Jurnal Formatif*, 2(2), 111-121.
- Sulut, K. K. (2019, Februari 26). *MAK Negeri di Bolmong Siap Terima Pendaftaran Siswa Baru*. Retrieved 14 7, 2019, from sulut.kemenag.go.id: http://sulut.kemenag.go.id/detail_berita.php?id=503184/MAK-Negeri-di-Bolmong-Siap-Terima-Pendaftaran-Siswa-Baru
- Tafsir, A. (2014). *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Thrupp, Martin; Willmott, Robert. (2003). *Education Management In Managerialist Times Beyond The Textual Apologists*. Britania Raya: Bell and Bain Ltd.
- U, M. S. (2013). Kebijakan Pemerintah dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia. *Lentera Pendidikan*, 16(2), 166-177.
- UI, I. M. (2018). *Kurikulum Madrasah Aliyah Kejuruan Unggulan Informatika*. www.mak-ui.sch.id.
- Yasin, N. (2017). *Dinamika Kebijakan Madrasah Aliyah Program Keagamaan dan Implikasinya di MAN Yogyakarta 1*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- youthmanual. (2019). <https://www.youthmanual.com/post/panduan-masuk-smk/pengenalan-bidang-dan-jurusan-smk/belajar-apa-aja-sih-di-sekolah->

menengah-kejuruan-smk. Retrieved Juli 13, 2019, from
[https://www.youthmanual.com: https://www.youthmanual.com/post/panduan-
masuk-smk/pengenalan-bidang-dan-jurusan-smk/belajar-apa-aja-sih-di-
sekolah-menengah-kejuruan-smk](https://www.youthmanual.com/post/panduan-masuk-smk/pengenalan-bidang-dan-jurusan-smk/belajar-apa-aja-sih-di-sekolah-menengah-kejuruan-smk)